

## STRATEGI ANTISIPASI POTENSI BENCANA ALAM DI KABUPATEN BANDUNG

Yudi Rusfiana<sup>1</sup>, Melinda Nurcahya Lestari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>1</sup>rusfianayoudhy@gmail.com; <sup>2</sup>melindanurcahya2@ipdn.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kerawanan dan potensi bencana alam di kabupaten Bandung yang tinggi dan perlu diantisipasi melalui strategi baik strategi kebijakan maupun yang bersifat praktis terkait dengan manajemen bencana.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan teori di antaranya teori strategi kebijakan dan manajemen bencana serta teori lainnya yang dianggap relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk terdapat komitmen Pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan BNPB untuk tingkat nasional dan BPBD untuk tingkat daerah.

Strategi yang dapat dilakukan dapat di analisis dari aspek policy dimana terdapat beberapa strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengantisipasi kerawanan bencana alam di antaranya telah terbit Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan pada tataran praktis telah dilaksanakan manajemen bencana secara terencana dan sistematis.

**Kata Kunci:** Strategi, Potensi Bencana Alam; Penanggulangan Bencana

### Abstract

*This research is motivated by the high level of vulnerability and potential for natural disasters in Bandung district and needs to be anticipated through strategies, both policy and practical strategies related to disaster management.*

*This research is a descriptive qualitative research using several theoretical approaches including the theory of policy strategy and disaster management as well as other theories that are considered relevant. The results of the study show that there is a form of Government commitment in disaster management efforts carried out by BNPB at the national level and BPBD at the regional level.*

*Strategies that can be carried out can be analyzed from the policy aspect where there are several policy strategies that have been carried out by the Bandung Regency Government in anticipating natural disaster vulnerability. 2 of 2013 concerning the Implementation of Disaster Management and at a practical level, disaster management has been carried out in a planned and systematic manner.*

**Keywords:** Strategy, Potential Natural Disasters; Disaster management

## PENDAHULUAN

Menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun non alam dan sosial diperlukan upaya penanggulangan bencana yang efektif. Penanggulangan bencana itu sendiri dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana, pencegahan bencana,

tanggap darurat dan rehabilitasi. Sementara Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Penanggulangan bencana dimaksud tentunya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah secara terencana,

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyatnya dalam segala bentuk ancaman di antaranya dari bencana alam, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Alinea Ke-IV (empat) diamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum<sup>1</sup>. Bentuk komitmen Pemerintah untuk hal dimaksud adalah dengan terbit Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tugas tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat daerah<sup>2</sup>. Artinya bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagaimana diketahui Indonesia berada di daerah Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia tidak akan lepas dari ancaman gempa bumi, selain itu bencana alam lainnya seperti banjir, gunung merapi, longsor dan lain sebagainya juga kerap kali terjadi di Indonesia. Termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana data dibawah ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi.

Berdasarkan data pada tabel diatas Banjir, gerakan tanah/longsor dan kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi disebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung. Selain bencana alam, dewasa ini

---

1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

bencana karena manusia juga mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan erat dengan berkembangnya industri, yang kemudian mengakibatkan bahaya karena kesalahan dan kelalaian teknologi. Begitu banyak bencana karena ulah manusia lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan lingkungan, yang pada akhirnya menimbulkan bencana<sup>3</sup>. Seperti halnya penyebab banjir di Kabupaten Bandung, yakni karena berkurangnya areal hutan lindung atau perambahan, berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik, lahan kritis, erosi, sedimentasi, limbah peternakan, budi daya pertanian tidak ramah lingkungan, limbah industri, domestik, sampah dan masalah tata ruang<sup>4</sup>.

Pada kondisi seperti dikemukakan di atas diperlukan berbagai langkah antisipatif sebagai strategi yang efektif dalam menghadapi kerawanan bencana alam di Kabupaten Bandung. Strategi ini akan mencakup strategi yang bersifat policy dan praktis. Berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan judul tulisan "Strategi Antisipasi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung"

### **Perumusan Masalah dan Tujuan**

Sebagaimana dikemukakan pada pendahuluan guna mengantisipasi potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung diperlukan strategi yang efektif dari aspek policy atau kebijakan dan aspek praktis, karena itu rumusan masalah yang diajukan

---

3 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Modul Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana, Jakarta, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008

4 Lihat, Data BPBD Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung

Tabel 1  
Rekapitulasi Data Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017

NO	JENIS BENCANA	AKIBAT BENCANA									LOKASI BENCANA
		2015			2016			2017			
		JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH PENGUNGSI	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH PENGUNGSI	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH PENGUNGSI	
1	BANJIR	12	20.155	316	55	124.413	5694	19	54	16	Lokasi Kejadian tersebar di 22 Kecamatan (Cicalengka, Banjaran, Pengalengan, Ciwidey, Baleendah, Ciparay, Dayeuhkolot, Solokan Jeruk, Cileunyi, Bojongsong, Pamengpeuk, Cikancung, Cimenyan, Canguang, Katapang, Majalaya, Arjasari, Margaasih, Pacet, Paseh, Kutawaringin)
2	GERAKAN TANAH / LONGSOR	33	306	45	98	462	28	29	187	3	Lokasi Kejadian tersebar di 21 Kecamatan (Cicalengka, Banjaran, Pengalengan, Ciwidey, Baleendah, Dayeuhkolot, Pamengpeuk, Canguang, Katapang, Arjasari, Pacet, Paseh, Kutawaringin, Rancabali, Kertasari, Cimenyan, Pasir jambu, Cimaung, Soreang, Ibum, Cilengkrang, Nagreg)
3	ANGIN KENCANG / PUTTING BELIUNG	13	133	0	14	1323	0	7	36	3	Lokasi Kejadian tersebar di 13 Kecamatan (Cicalengka, Banjaran, Pengalengan, Baleendah, Pamengpeuk, Katapang, Arjasari, Kertasari, Soreang, Ciparay, Rancabali, Majalaya)
4	KEKERINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	GEMPA BUMI	0	0	0	0			1	269	0	Kecamatan Ibum
6	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	KEBAKARAN	125	688	465	78	465	6	41	232	22	Lokasi Kejadian tersebar di 30 Kecamatan kecuali kecamatan Ciwidey

Sumber: BPBD Kabupaten Bandung 2017 (dalam bab1.pdf (uinsgd.ac.id) didownload pada tanggal 15 November 2021 pukul 14.00 wib)

dalam tulisan ini adalah “Bagaimana strategi kebijakan dan praktis dalam mengantisipasi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung” dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi kebijakan dan praktis dalam mengantisipasi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung

## METODE DAN PENDEKATAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun beberapa teknik penelitian yang dipergunakan antara lain studi lapangan berupa observasi, wawancara dengan beberapa informan yang dianggap paham dengan fokus penelitian dan studi kepustakaan.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif<sup>5</sup>. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan

5 Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: GemaInsani, 2001

rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya.

Strategi merupakan rumusan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Tiga hal penting dalam strategi adalah *means*, *end* dan *way*, yaitu mengetahui dan memahami tujuan yang ingin dicapai dengan melihat sumber daya yang ada pada organisasi serta jalan yang ditempuh menuju tujuan tersebut. Proses dalam pelaksanaan strategi yaitu melihat lingkungan, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi mengontrolnya karena itu Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi: Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah<sup>6</sup>.

### Bencana Alam

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada<sup>7</sup>.

Lebih lanjut, menurut Parker (1992), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respons dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Menurut Coburn, A. W. dkk. 1994. Di dalam UNDP mengemukakan bahwa: Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang memberikan meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma<sup>8</sup>.

### Manajemen Bencana

Manajemen Bencana Merupakan sistem yang komprehensif untuk menanggulangi seluruh kejadian secara cepat, tepat dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan

6 Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996

7 Wijayanto, koko. 2012. Pencegahan dan Manajemen Bencana. (online). <https://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognizepencegahan-bencana>

8 Ibid 7

dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan:

a. Pra bencana yang meliputi

1) Pencegahaan

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya)

2) Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

3) Kesiapsiagaan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana untuk menghindari korban jiwa dan kerugian harta benda.

Tindakan kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana pencegahan bencana, menyiapkan sarana komunikasi, menyiapkan lokasi evakuasi, pelatihan personil, penyediaan sarana dan prasarana. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.

b. Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada

saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkanyang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Sistem tanggap darurat dilaksanakan dengan cara membentuk tim khusus pengendalian dan penanganan kondisi darurat, seperti pada saat terjadi kebakaran, peledakan maupun kecelakaan kerja

c. Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana

1) Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

2) Rehabilitasi perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana

3) Rekontruksi adalah membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat.

## PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap

bencana. Fenomena tersebut yang sering menyebabkan masyarakat yang tidak siap dalam mengelola ancaman – ancaman yang ada. Hal tersebut lebih karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Di Kabupaten Bandung bencana banjir, gerakan tanah/longsor dan kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi disebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung.

Selain bencana alam, dewasa ini bencana karena manusia juga mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan erat dengan berkembangnya industri, yang kemudian mengakibatkan bahaya karena kesalahan dan kelalaian teknologi. Begitu banyak bencana karena ulah manusia lainnya, sehingga menyebabkan perusakan lingkungan dan ketidakseimbangan lingkungan, yang pada akhirnya menimbulkan bencana. Seperti halnya penyebab banjir di Kabupaten Bandung, yakni karena berkurangnya areal hutan lindung atau perambahan, berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik, lahan kritis, erosi, sedimentasi, limbah peternakan, budi daya pertanian tidak ramah lingkungan, limbah industri, domestik, sampah dan masalah tata ruang. Banjir di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari permasalahan sungai citarum yang menjadi sendi utama aliran air di Jawa Barat, permasalahan ini sulit diselesaikan karena terkendala berbagai masalah seperti: penanganan yang masih sektoral, keterbatasan anggaran, penanganan tidak dapat hanya dilakukan sendiri pada tingkat Kabupaten, kurangnya terterlibatan masyarakat dan pihak swasta<sup>9</sup>

Terdapat beberapa strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengantisipasi kerawanan bencana alam di antaranya Dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

pada pasal 30 disebutkan: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana.” Pasal tersebut selanjutnya perjelas pada pasal-pasal berikutnya seperti: 30 mengenai prabencana (Pasal 39 berisi tentang situasi tidak terjadi bencana dan pasal 51 tentang situasi terdapat potensi terjadi bencana), pasal 57 mengenai saat tanggap darurat, dan pasal 69 mengenai pasca bencana. walaupun dalam hasil wawancara dengan beberapa informan dikatakan bahwa Dalam implementasinya masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal terlebih pada tahap prabencana yang selanjutnya berdampak pada tahap situasi tanggap bencana dan pascabencana yakni pada aspek kemampuan pengelolaan dan operasional aparat penanggulangan bencana serta kurikulum di daerah Kabupaten Bandung terkait peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bencana di Kabupaten Bandung sebagai tenaga instruktur yang ditunjang oleh keahlian.

Namun demikian pada aspek praktisantisipasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan memutakhirkan peta bencana dan penyediaan fasilitas evakuasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kemudian ditunjang oleh upaya sinergitas, koordinasi yang senantiasa dilakukan dengan instansi lain dalam mengantisipasi kerawanan bencana alam terumata tanah longsor dan banjir di Kabupaten Bandung, hal ini dapat dilihat dari aspek Tahap Pra Bencana (mencangkup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini). Pencegahan (prevention) dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya: Melarang pembakaran hutan dan senantiasa menjaga kelestarian alam serta ekosistem, Melarang penambangan galian di daerah yang curam, dan ,elarang membuang sampah sembarangan. Mitigasi Bencana (Mitigation) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

---

9 Lihat, Data BPBD Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kegiatan mitigasi dilakukan melalui a) pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c) penyelenggaraan pendidikan. Kesiapsiagaan (Preparedness) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain: penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; penyiapan lokasi evakuasi; penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Peringatan Dini (Early Warning) merupakan Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus: Menjangkau masyarakat (accessible), Segera (immediate), Tegas tidak membingungkan (coherent),

Tahap saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian: Tanggap Darurat (response) Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk

yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Bantuan Darurat (relief) Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa: Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Kemudian Tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan (recovery) Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial ekonomi budaya, dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rehabilitasi (rehabilitation) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum,

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi (reconstruction) Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

## SIMPULAN

Bentuk komitmen Pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana termasuk pada aspek antisipasi kerawanan bencana adalah dengan terbit Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tugas tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat daerah. Artinya bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Strategi yang dapat dilakukan dapat di analisis dari aspek policy dimana terdapat beberapa strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengantisipasi kerawanan bencana alam di antaranya telah terbit

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa "Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. mengenai prabencana dalam implementasinya masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal terkait dengan aspek kemampuan pengelolaan dan operasional aparat penanggulangan bencana serta kurikulum. Namun demikian pada tataran praktis manajemen bencana sudah terdapat perencanaan dan pelaksanaan yang dapat berjalan dengan baik.

## SARAN

1. Untuk mengantisipasi kerawanan potensi bencana alam hendaknya pemerintah kabupaten bandung lebih intensif dalam peningkatan kualitas edukasi masyarakat dan meningkatkan kurikulum pendidikan dan latihan kepada para pelaksana teknis kebencanaan (BPBD) dengan fokus pada pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat.
2. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi lainnya terutama instansi vertikal seperti halnya Basarnas, Komando kewilayahan TNI dan Polri agar lebih ditingkatkan sehingga soliditas aparat pemerintah dalam mengantisipasi potensi bencana alam semakin baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996
- Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana. ALFABETA
- Rijanta, dkk. Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. 2014. UGM
- Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: GemaInsani, 2001
- Syamsul Maarif, Pikiran Dan Gagasan Penanggulangan Bencana Di Indonesia, Jakarta; Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012



- Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Pemda Kabupaten Bandung, 2017 Data BPBD Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung
- Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Modul Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana, Jakarta, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008
- <https://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognizepencegahan-bencana>, Wijayanto, koko. 2012. Pencegahan dan Manajemen Bencana. (online).
- <https://indonesiabaik.id/> Wilayah Rawan Gempa di Indonesia | Indonesia Baik
- <https://www.elshinta.com/news/195012/2019/12/12/bpbd-catat-57-BPBD-catat-57-bencana-terjadi-di-Kabupaten-Bandung-selama-2019> (elshinta.com)